

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *UNION BUSTING*  
(PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA) DALAM SENGKETA  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)**

**Rr. Halimatu Hira**

**Abstrak**

Pemberangusan serikat pekerja (*Union Busting*) dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai instrumennya, memberikan dampak yang besar terhadap pekerja atau buruh. Hal ini karena selain hak berserikat yang dirugikan, ketika terjadi PHK buruh atau pekerja tersebut kehilangan pendapatan dan pekerjaannya. Kondisi demikian telah terjadi diberbagai sengketa dengan pola atau mekanisme yang berbeda-beda. Sebagai tindak lanjut dari terjadinya sengketa PHK yang merupakan bentuk dari praktik *Union Busting* tentu pemerintah melakukan berbagai upaya penegakan hukum namun, terdapat beberapa hambatan baik itu terkait dengan objek penegakan hukum (peraturan perundang-undangan), subjek penegakan hukum dalam arti luas (para pihak yang bersengketa), hingga subjek penegakan hukum dalam arti sempit (aparatus penegak hukum). Oleh karena itu, terdapat upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap praktik *Union Busting* dengan instrumen PHK yaitu mulai dari upaya sebelum terjadinya PHK dan sengketa PHK, selama proses penyelesaian sengketa, hingga setelah penyelesaian sengketa selesai.

Untuk menganalisis pola, hambatan, dan upaya penegakan hukum tersebut dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Selain itu, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu mulai dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Adapun data-data yang dianalisis bersumber dari penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, hasil konferensi perburuhan, peraturan perundang-undangan (dokumen resmi pemerintah), putusan pengadilan, internet, dan dokumen lain yang relevan. Keseluruhan data tersebut kemudian dideskripsikan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dan nantinya output dari penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan dan saran yang aplikatif.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, *Union Busting*, dan Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**

**LAW ENFORCEMENT TOWARDS UNION BUSTING IN WORK  
TERMINATION DISPUTE**

**Rr. Halimatu Hira**

***Abstract***

*The suppression of trade unions (Union Busting) with Termination of Employment Relations (PHK) as the instrument, has a major impact on workers or laborers. This is because in addition to the right to organize that is harmed, when there is a layoff, the worker or worker loses his income and job. Such conditions have occurred in various disputes with different patterns or mechanisms. As a follow-up to the occurrence of layoff disputes which are a form of Union Busting practice, of course the government is making various efforts to enforce the law. dispute), to the subject of law enforcement in the narrow sense (law enforcement officers). Therefore, there are efforts that must be made to optimize law enforcement against Union Busting practices with layoff instruments, namely starting from efforts before layoffs and layoff disputes, during the dispute resolution process, until after the dispute resolution is complete.*

*To analyze patterns, obstacles, and law enforcement efforts in this study, researchers used normative juridical research methods. In addition, there are several approaches used, starting from the statutory approach, the conceptual approach, the case approach, the comparative approach and the historical approach. The data analyzed comes from previous research, books, scientific journals, results of labor conferences, laws and regulations (official government documents), court decisions, the internet, and other relevant documents. The entire data is then described from general matters to specific matters and later the output of this research will produce applicable conclusions and suggestions.*

***Keywords: Law Enforcement, Union Busting, Work Termination Dispute***